

PERAN KOMUNIKASI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SEKOLAH

Ardeas Ananda¹ Habib Muhsin ²

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Jln. Timoho No.317, Yogyakarta, 55225, Indonesia

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Jln. Timoho No.317, Yogyakarta, 55225, Indonesia

*Corresponding author: ardeas.ananda1@gmail.com

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyediaan makanan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program dan pihak sekolah sebagai penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran komunikasi SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah yang berada di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan Model Komunikasi Harold D. Lasswell yang meliputi komunikator (*who*), pesan (*says what*), saluran atau media (*in which channel*), komunikan (*to whom*), dan efek (*with what effect*) untuk melihat proses komunikasi antara SPPG dan pihak sekolah dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive* yang terdiri atas Kepala SPPG Purwomartani 2, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sambisari, dan Kepala Sekolah TK Purbosari Kalasan. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara SPPG dan pihak sekolah berlangsung melalui komunikasi formal dan informal, seperti surat resmi, sosialisasi, rapat koordinasi, telepon, kunjungan langsung, serta grup *whatsapp*. Komunikasi tersebut berperan dalam penyampaian informasi, koordinasi distribusi makanan, penyelesaian kendala, serta evaluasi pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat hambatan seperti perubahan jadwal kegiatan sekolah, keterlambatan distribusi, dan perbedaan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan, hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang intensif dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan demikian, komunikasi SPPG memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah.

Kata kunci: Peran, Komunikasi, SPPG, Program Makan Bergizi Gratis, Model Komunikasi Laswell

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is one of the government policies aimed at improving students' nutritional status through the provision of nutritious meals in schools. In its implementation, the success of the program is determined not only by the technical aspects of food provision but also by the effectiveness of communication between the Nutrition Fulfillment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) as the program implementer and schools as the beneficiaries. This study aims to identify and describe the role of SPPG communication in the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in schools located in Purwomartani Village, Kalasan District, Sleman Regency. This study uses Harold D. Lasswell's Communication Model, which consists of communicator (Who), message (Says What), channel or media (In Which Channel), receiver (To Whom), and effect (With What Effect), to examine the communication process between SPPG and schools in the implementation of the program. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. The research informants were selected using purposive and consisted of the Head of SPPG Purwomartani 2, the Principal of SD Muhammadiyah Sambisari, and the Principal of TK Purbosari Kalasan. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that communication between SPPG and schools takes place through both formal and informal communication, such as official letters, socialization activities, coordination meetings, telephone calls, direct visits, and WhatsApp groups. Such communication plays an important role in delivering information, coordinating food distribution, resolving problems, and evaluating program implementation. Although several obstacles remain, including changes in school schedules, delays in food distribution, and differences in understanding of implementation procedures, these obstacles can be addressed through intensive coordination and continuous two-way communication. Thus, SPPG communication plays an important role in supporting the smooth and successful implementation of the Free Nutritious Meal Program in schools.

Keywords: Role, Communication, Free Nutritious Meals Program, Lasswel Model Communication

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan yang diperoleh, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan pemenuhan gizi. Dalam pembangunan manusia, gizi menjadi salah satu aspek mendasar karena berkaitan dengan pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kemampuan kognitif seseorang. Pemenuhan gizi yang baik dapat mendukung kemampuan belajar, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga daya tahan tubuh. Oleh sebab itu, kondisi gizi menjadi semakin penting pada anak usia sekolah yang sedang berada dalam tahap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang berlangsung secara pesat. Pada tahap ini, anak mulai aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir. Kecukupan asupan gizi dan kondisi kesehatan dapat memengaruhi kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, anak yang mengalami kekurangan gizi berpotensi lebih mudah mengalami kelelahan, mengantuk, kesulitan berkonsentrasi, dan menurunnya motivasi dalam belajar.

Persoalan pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah masih menjadi salah satu perhatian di Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya anak yang belum memperoleh asupan makanan yang cukup dan bergizi sebelum memulai kegiatan belajar di sekolah. Penelitian Arifin et al., (2025), menunjukkan bahwa 41% anak usia sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar. Penelitian yang sama mencatat bahwa 21,8% anak melewati sarapan dan hanya sekitar 10%

anak yang mengonsumsi sarapan dengan menu makanan seimbang. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi sebelum kegiatan belajar masih menghadapi persoalan. Asupan makanan pada pagi hari juga memiliki kaitan dengan kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama dalam mempertahankan konsentrasi. Verdiana dan Muniroh melalui penelitian terhadap siswa sekolah dasar di Malang, menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan sarapan dan tingkat konsentrasi belajar. Siswa yang terbiasa mengonsumsi sarapan sehat memiliki proporsi konsentrasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak sarapan secara teratur atau tidak sarapan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan asupan makanan pada pagi hari dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung kesiapan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran (Verdiana & Muniroh, 2017).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak usia sekolah. Sekolah menjadi salah satu lingkungan yang strategis untuk pelaksanaan intervensi gizi karena kegiatan pendidikan berlangsung secara rutin dan melibatkan peserta didik dalam lingkungan yang terorganisasi. Pelaksanaan program gizi melalui sekolah memungkinkan sasaran program dijangkau secara lebih terarah serta membuka ruang keterlibatan berbagai pihak. Dengan demikian, intervensi gizi berbasis sekolah dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekaligus menunjang kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjawab persoalan tersebut adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin di lingkungan sekolah. Selain membantu mengurangi rasa lapar selama kegiatan belajar, MBG juga diarahkan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesehatan, mencegah kekurangan gizi, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung pembangunan manusia, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyediaan menu sehat, memperhatikan kebutuhan gizi, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang diterima peserta didik (Afriaji, 2026).

Program MBG merupakan program publik yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur kelembagaan. Program ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian peserta didik, tetapi juga mendukung terbentuknya lingkungan pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan (Agustini, 2025). Pelaksanaan MBG karena itu tidak berhenti pada penyediaan makanan, tetapi mencakup rangkaian kegiatan mulai dari pengelolaan bahan pangan, pengolahan, pendistribusian, pengawasan kualitas, hingga koordinasi dengan pihak sekolah. Berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, pemerintah daerah sebagai pengawas wilayah, unit pelaksana di lapangan, hingga sekolah sebagai penerima manfaat. Pada tingkat operasional, SPPG menjadi pihak yang menjalankan berbagai kegiatan teknis program MBG. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan menu berdasarkan standar gizi, pengolahan dan pengemasan makanan, pendistribusian ke sekolah, serta memastikan makanan diterima oleh siswa dengan baik. Selain menjalankan tugas teknis, SPPG juga memiliki posisi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan pihak sekolah.

Pelaksanaan program publik pada dasarnya tidak hanya bergantung pada tersedianya sumber daya maupun perencanaan yang baik. Program MBG memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah pusat dan daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG, pihak sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Banyaknya pihak yang terlibat menuntut adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang terarah, serta pertukaran informasi agar setiap pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Penelitian Prasetyo et al., (2026) mengenai koordinasi SPPG dan sekolah dalam pelaksanaan MBG di Bojonegoro menunjukkan bahwa koordinasi pada tingkat pelaksana masih cenderung bersifat operasional dan belum sepenuhnya terlembaga. Penelitian tersebut menemukan adanya ketidakseimbangan dalam pertukaran informasi, komunikasi yang masih banyak berlangsung satu arah, keterbatasan dokumentasi, jalur pelaporan yang belum jelas, serta pemberian

umpan balik yang belum konsisten. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan distribusi, perubahan menu yang tidak tersampaikan, dan bertambahnya beban administratif pihak sekolah.

Persoalan komunikasi juga terlihat dalam penelitian Fitriani & Maulidya, (2026) yang menemukan bahwa komunikasi antaraktor dalam pelaksanaan MBG masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain perubahan kebijakan yang berlangsung cepat, perbedaan penerimaan informasi, keterlambatan penyampaian jadwal distribusi, serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, komitmen para pelaksana, dan keterpaduan birokrasi. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme komunikasi dan koordinasi yang mampu menghubungkan tugas, kepentingan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan MBG di lingkungan satuan pendidikan, komunikasi memiliki kedudukan penting karena menjadi penghubung antara kebijakan dengan praktik di lapangan. Berbagai informasi, seperti sasaran penerima manfaat, jadwal distribusi, jumlah makanan, menu, mekanisme pelayanan, perubahan pelaksanaan, hingga keluhan, perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Panduan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menempatkan kepala sekolah dan guru sebagai pihak yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dukungan terhadap implementasi MBG di satuan pendidikan. Oleh karena itu, komunikasi tidak sekadar berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mendukung proses koordinasi, pengawasan, penyelesaian masalah, dan pemberian umpan balik selama program berlangsung.

Pentingnya komunikasi tersebut dapat dilihat dalam hubungan antara SPPG dan sekolah. SPPG sebagai pihak yang menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi perlu menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program kepada sekolah. Di sisi lain, sekolah perlu memberikan informasi mengenai kondisi penerima manfaat, kebutuhan di lapangan, serta berbagai kendala yang muncul selama proses distribusi dan pemberian makanan kepada siswa. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan komunikasi dua arah agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian mengenai implementasi MBG di SMP Negeri 13 Surabaya, misalnya, menunjukkan bahwa komunikasi antara sekolah dan penyedia program dilakukan melalui koordinasi dengan memanfaatkan media komunikasi seperti grup *whatsApp* (Wahyuningtias & Hazin, 2026). Komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan program.

Dengan demikian, komunikasi dapat dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program MBG. Melalui komunikasi, informasi mengenai kebijakan maupun teknis pelaksanaan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan, dipahami secara bersama, dan dijadikan dasar dalam menjalankan tugas serta menentukan tindakan di lapangan. Dalam hubungan SPPG dengan sekolah, komunikasi yang jelas dan terarah diperlukan agar pesan mengenai pelaksanaan MBG dapat disampaikan, diterima, dan direspons secara tepat. Untuk memahami proses tersebut, komunikasi dapat dikaji melalui unsur komunikator, pesan, media, komunikan, serta efek yang muncul dari proses komunikasi tersebut.

Komunikasi pada dasarnya merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan membangun kesamaan makna. Dalam organisasi dan pelayanan publik, komunikasi memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan koordinasi, menyampaikan informasi, mengendalikan kegiatan, serta membantu menyelesaikan permasalahan. Pelaksanaan MBG membutuhkan koordinasi antara SPPG dan sekolah secara rutin. Pihak sekolah perlu memperoleh informasi mengenai jadwal pengiriman makanan, mekanisme pembagian, jumlah porsi, dan ketentuan konsumsi makanan bagi siswa. Sebaliknya, SPPG juga memerlukan informasi dari sekolah mengenai jumlah siswa, kegiatan sekolah, perubahan jadwal pembelajaran, maupun kondisi tertentu yang dapat

memengaruhi pelaksanaan program. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi dua arah menjadi bagian yang penting dalam mendukung pelaksanaan MBG.

Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan program. Kesalahan dalam penyampaian informasi mengenai jadwal, misalnya, dapat menyebabkan makanan tiba tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kurangnya informasi yang diterima guru juga dapat membuat siswa belum siap ketika makanan dibagikan. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap prosedur pembagian makanan dapat menimbulkan kebingungan pada saat pelaksanaan di lapangan. Keadaan tersebut dapat memengaruhi efektivitas program meskipun makanan telah tersedia secara teknis. Dalam perspektif komunikasi organisasi, keberhasilan suatu kegiatan tidak terlepas dari kejelasan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan hubungan antara pihak yang menyampaikan dengan pihak yang menerima pesan. Komunikasi yang efektif bukan hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dengan terbentuknya pemahaman dan kerja sama. Dalam pelaksanaan MBG, SPPG dengan demikian tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga berperan sebagai komunikator dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Peran SPPG sebagai pelaksana teknis sekaligus aktor komunikasi menjadi penting dalam pelaksanaan program. SPPG tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi penghubung informasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan sekolah dalam penyampaian informasi, pemantauan konsumsi, serta edukasi mengenai gizi menjadikan lingkungan pendidikan sebagai salah satu titik penting dalam komunikasi program. Sementara itu, orang tua juga menjadi pihak yang menerima informasi dan turut menentukan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG, termasuk dalam memastikan makanan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh anak (Afriaji, 2026). Dalam menjalankan tugasnya, SPPG membutuhkan komunikasi interpersonal maupun komunikasi organisasi dengan pihak sekolah. Komunikasi interpersonal dapat berlangsung ketika petugas SPPG berinteraksi secara langsung dengan kepala sekolah atau guru untuk membahas pelaksanaan program. Sementara itu, komunikasi organisasi dapat dilakukan melalui surat resmi, grup pesan singkat, maupun koordinasi rutin. Kedua bentuk komunikasi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan ketentuan.

Pihak sekolah sendiri memiliki struktur organisasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dengan peran yang berbeda. Kepala sekolah memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pemberian izin pelaksanaan program di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mengatur siswa ketika makanan dibagikan serta mengawasi konsumsi makanan, sedangkan tenaga kependidikan dapat membantu proses distribusi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan SPPG perlu mampu menjangkau unsur-unsur sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan program agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan secara tepat.

Pada pelaksanaannya, program MBG tidak selalu terbebas dari kendala. Beberapa persoalan yang dapat muncul antara lain keterlambatan pengiriman makanan, ketidaksesuaian waktu pembagian dengan jadwal pembelajaran, kurangnya sosialisasi kepada siswa, serta respons siswa terhadap makanan yang diberikan. Berbagai kendala tersebut tidak selalu disebabkan oleh persoalan teknis, tetapi dapat pula berkaitan dengan proses komunikasi. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam pelaksanaan MBG di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Wilayah tersebut merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program MBG di sekolah yang melibatkan interaksi antara SPPG dan pihak sekolah sebagai penerima manfaat. Kerja sama yang berlangsung antara kedua pihak menjadikan komunikasi sebagai salah satu unsur yang penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Kajian mengenai program pemerintah selama ini lebih banyak diarahkan pada hasil program maupun dampak kebijakan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus melihat proses komunikasi pada tingkat operasional pelaksanaan program masih relatif terbatas. Padahal, komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik tetap dapat menghadapi hambatan apabila proses penyampaiannya kepada pelaksana dan pihak yang berkepentingan tidak berlangsung secara efektif. Pelaksanaan Program Makan

Bergizi Gratis di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman telah berjalan sejak program tersebut mulai diimplementasikan secara nasional. Di wilayah tersebut terdapat SPPG yang bertugas memenuhi kebutuhan gizi siswa di sejumlah sekolah dasar yang berada dalam jangkauan wilayah operasionalnya. Setiap hari, SPPG menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa sesuai dengan standar menu yang telah ditentukan. Proses tersebut membutuhkan koordinasi antara petugas SPPG dengan pihak sekolah, mulai dari konfirmasi jumlah porsi, penentuan jadwal pengiriman, hingga mekanisme pembagian makanan kepada siswa di kelas.

Interaksi antara SPPG dan pihak sekolah di Kapanewon Kalasan berlangsung secara rutin dalam pelaksanaan program. Komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun menggunakan grup pesan singkat yang melibatkan petugas SPPG, kepala sekolah, dan guru yang memiliki tugas dalam pelaksanaan program. Saluran komunikasi tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal pengiriman, perubahan menu, maupun kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan program. Namun, tingginya intensitas komunikasi tidak selalu menjamin bahwa komunikasi telah berlangsung secara efektif.

Dalam pelaksanaan di lapangan masih dapat ditemukan kondisi seperti ketidaksesuaian waktu pengiriman makanan dengan jadwal istirahat siswa maupun kurangnya pemahaman guru terhadap prosedur pembagian makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan MBG di Kalurahan Purwomartani telah berjalan secara teknis, aspek komunikasi antara SPPG dan sekolah masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya memandang pelaksanaan MBG dari sisi kegiatan teknis, tetapi berfokus pada proses komunikasi yang berlangsung antara pelaksana program dan pihak sekolah.

Kajian diarahkan pada bentuk komunikasi yang digunakan serta hambatan komunikasi yang muncul selama pelaksanaan program. Dengan mengambil studi kasus di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik pada tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memberikan kontribusi akademis dalam kajian komunikasi organisasi dan komunikasi pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami dan menggambarkan secara mendalam proses komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama berkaitan dengan peran komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah. Moleong, (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan kemudian menggambarkannya dalam bentuk kata-kata sesuai dengan kondisi alamiah. Sementara itu, Sugiyono, (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memperoleh data yang mendalam dengan menitikberatkan pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendekatan kualitatif dipandang sesuai untuk mengkaji proses komunikasi, koordinasi, penyampaian informasi, serta berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG.

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sleman Kalasan Purwomartani 2, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa SPPG tersebut merupakan unit yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program MBG serta melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah penerima manfaat yang berada dalam wilayah kerjanya. Kondisi tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang diarahkan untuk mengetahui bagaimana komunikasi SPPG berlangsung dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di sekolah.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik tersebut digunakan dengan mempertimbangkan keterkaitan informan terhadap tujuan dan fokus

penelitian. Sugiyono, (2016) menjelaskan bahwa purposif merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, sehingga informan yang dipilih dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yaitu Kepala SPPG Purwomartani 2 sebagai informan utama, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sambisari, serta Kepala Sekolah TK Purbosari Kalasan sebagai informan pendukung. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan dan koordinasi Program MBG serta mengetahui proses komunikasi yang berlangsung antara SPPG dengan pihak sekolah.

Pihak sekolah dipilih sebagai informan karena memiliki hubungan langsung dengan SPPG dalam pelaksanaan Program MBG. Hubungan tersebut mencakup penerimaan informasi, koordinasi mengenai distribusi makanan, penyampaian kondisi yang terdapat di sekolah, hingga penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama program berlangsung. Adapun wali murid dan masyarakat tidak dijadikan informan karena penelitian ini secara khusus membatasi fokus pada komunikasi organisasi yang berlangsung antara SPPG dan sekolah. Meskipun wali murid dan peserta didik berkaitan dengan penerima manfaat program, keduanya bukan merupakan aktor utama dalam hubungan komunikasi organisasi yang menjadi fokus penelitian. Oleh sebab itu, wali murid dan peserta didik tidak dijadikan objek wawancara dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai proses komunikasi antara SPPG dan sekolah, bentuk komunikasi yang digunakan, media komunikasi, proses koordinasi, penyampaian informasi, serta berbagai hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan Program MBG. Penggunaan wawancara semi-terstruktur memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh informan, sehingga informasi yang diperoleh dapat digali secara lebih luas dan mendalam. Observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan Program MBG serta interaksi dan koordinasi yang berlangsung antara pihak SPPG dan sekolah. Dalam kegiatan tersebut, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang sedang diamati. Selain wawancara dan observasi, dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Dokumentasi yang digunakan meliputi surat-menyurat, jadwal distribusi, serta berbagai dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif (Huberman & Miles, 1992) Model tersebut mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam proses analisis, data dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, meliputi bentuk komunikasi antara SPPG dan sekolah, proses penyampaian informasi, penggunaan media komunikasi, koordinasi, hambatan dalam komunikasi, serta efek komunikasi terhadap pelaksanaan Program MBG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwomartani 2 dengan pihak sekolah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komunikasi yang berlangsung menggunakan jalur formal dan informal serta berkembang menjadi komunikasi dua arah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Pada tahap awal, SPPG menggunakan komunikasi formal melalui surat pemberitahuan dan sosialisasi untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, jadwal distribusi, jumlah penerima manfaat, serta pembagian tugas antara SPPG dan sekolah. Mas Arif selaku Kepala SPPG Purwomartani 2 menjelaskan, "Sebelum pelaksanaan itu kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sekolah. Jadi sekolah diberikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, jadwal distribusi, jumlah penerima, dan bagaimana pembagian makanan di sekolah." Komunikasi tersebut menjadi dasar bagi pihak sekolah untuk memahami mekanisme program sebelum pelaksanaan distribusi makanan.

Setelah program berjalan, komunikasi berkembang menjadi lebih fleksibel melalui penggunaan grup WhatsApp, telepon, dan komunikasi secara langsung. Media tersebut digunakan terutama untuk menyampaikan informasi operasional yang membutuhkan respons cepat, seperti perubahan jadwal, penyesuaian jumlah makanan, maupun kendala dalam proses distribusi. Bu Widi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sambisari menyampaikan,

“Kalau komunikasi sehari-hari lebih seringnya sih melalui grup WhatsApp mas. Soalnya kami menerima informasi dari SPPG, misalnya terkait jadwal pengiriman makanan, jumlah porsi, atau kalau ada perubahan langsung misal ada omprang yang ketinggalan, terus ada menu yang keliru, itu bisa disampaikan di grup sehingga kami bisa segera menindaklanjuti dan menghubungi pihak dapur.”

Sementara itu, Bu Masuroh selaku Kepala TK Purbosari menyatakan,

“Kalau informasi sih paling cepat, dan yang paling sering digunakan memang WhatsApp. Kalau ada perubahan jadwal atau informasi lain dari SPPG biasanya langsung disampaikan melalui grup atau pesan pribadi sehingga kami bisa segera menyesuaikan dari sekolah.”

Penggunaan media tersebut menunjukkan bahwa komunikasi informal berfungsi melengkapi komunikasi formal dalam mendukung kebutuhan koordinasi selama program berlangsung. Komunikasi yang berlangsung juga bersifat dua arah. Pihak sekolah tidak hanya menerima informasi dari SPPG, tetapi turut memberikan konfirmasi mengenai jumlah peserta didik, menyampaikan perubahan kegiatan sekolah, serta melaporkan kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan MBG.

Sebaliknya, SPPG memberikan tanggapan terhadap informasi maupun pertanyaan yang disampaikan oleh sekolah. Dengan demikian, komunikasi antara SPPG dan sekolah tidak berhenti pada penyampaian pesan, tetapi berlangsung sebagai proses pertukaran informasi dan umpan balik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi memiliki fungsi koordinatif karena memungkinkan kedua pihak menyesuaikan pelaksanaan program berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Temuan tersebut dapat dipahami melalui konsep komunikasi organisasi yang melihat komunikasi sebagai proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam organisasi melalui jalur formal maupun informal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pelaksanaan MBG, komunikasi formal melalui surat dan sosialisasi berfungsi memberikan informasi dan pedoman awal, sedangkan komunikasi informal melalui WhatsApp, telepon, dan komunikasi langsung digunakan untuk merespons kebutuhan operasional. Kedua bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi dalam mendukung hubungan kerja antara SPPG dan sekolah.

Proses komunikasi tersebut selanjutnya dapat dilihat melalui model komunikasi Harold D. Lasswell yang terdiri atas *who, says what, in which channel, to whom, with what effect*. SPPG Purwomartani 2 berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan mengenai pelaksanaan MBG kepada pihak sekolah. Pesan yang disampaikan meliputi informasi mengenai jadwal distribusi, jumlah porsi, mekanisme pembagian makanan, perubahan pelaksanaan, serta kendala yang terjadi.

Saluran komunikasi yang digunakan berupa surat pemberitahuan, sosialisasi, *whatsapp*, telepon, dan komunikasi langsung. Pihak sekolah menjadi komunikan yang menerima, memahami, dan menindaklanjuti informasi tersebut. Adapun efek komunikasi terlihat dari pemahaman pihak sekolah terhadap mekanisme program, terbentuknya koordinasi antara SPPG dan sekolah, serta kemampuan kedua pihak dalam merespons kendala selama pelaksanaan MBG.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan program MBG karena menghubungkan SPPG sebagai pelaksana dengan sekolah sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Komunikasi memungkinkan informasi mengenai program disampaikan dan dipahami, sekaligus memberikan ruang bagi sekolah untuk menyampaikan kondisi dan permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan. Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan MBG tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi, pertukaran umpan balik, dan penyelesaian kendala antara SPPG dan sekolah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachman et al., (2026) yang menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan program MBG. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nabila Putri Ananta et al., (2025) yang menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu

faktor penting dalam mendukung koordinasi antar pihak dalam implementasi MBG di sekolah. Namun, penelitian ini memberikan fokus yang lebih spesifik dengan melihat bagaimana komunikasi antara SPPG dan sekolah berlangsung melalui jalur formal dan informal serta bagaimana proses komunikasi tersebut mendukung koordinasi dalam pelaksanaan program.

Konsep Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit layanan yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembentukan SPPG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Program tersebut menjadi salah satu strategi untuk membantu mengatasi berbagai persoalan gizi, seperti kekurangan gizi, stunting, dan anemia, sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat tumbuh sehat, aktif, serta mampu mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal.

Sebagai unit pelaksana program MBG, SPPG memiliki tanggung jawab terhadap rangkaian proses penyediaan makanan bergizi. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan menu sesuai dengan standar gizi, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan perlu memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, kualitas makanan, serta ketepatan waktu distribusi agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Keberadaan SPPG pada dasarnya ditujukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi dapat diberikan secara berkualitas, aman, dan merata, khususnya kepada peserta didik sebagai sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis. Melalui pelayanan tersebut, pemerintah berupaya mendukung peningkatan status gizi masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan anak, konsentrasi serta prestasi belajar, sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia dini.

Dalam pelaksanaan program MBG Makan Bergizi Gratis, fungsi SPPG tidak terbatas pada penyediaan makanan. SPPG juga memiliki peran dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam program, seperti Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, sekolah, tenaga gizi, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi antarpihak menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan program agar proses distribusi makanan dapat berlangsung sesuai sasaran, waktu, dan kebutuhan penerima manfaat.

SPPG Sleman Kalasan Purwomartani 2 merupakan salah satu unit pelaksana program MBG yang menjalankan fungsi tersebut di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan operasionalnya, SPPG bertanggung jawab memastikan proses produksi hingga distribusi makanan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, SPPG juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat program. Hubungan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program karena sekolah merupakan pihak yang berhubungan secara langsung dengan proses penerimaan dan pemberian makanan kepada peserta didik. Kondisi tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji peran komunikasi SPPG dalam mendukung pelaksanaan program MBG di sekolah.

Sasaran pelayanan SPPG Sleman Kalasan Purwomartani 2 dalam penelitian ini adalah sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat program MBG di wilayah kerjanya. Sekolah memiliki posisi sebagai mitra dalam pelaksanaan program, terutama dalam kegiatan pendataan penerima manfaat, koordinasi jadwal distribusi, penerimaan makanan, serta pemberian evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dengan adanya hubungan kerja sama tersebut, koordinasi antara SPPG dan sekolah menjadi salah satu unsur yang mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG.

Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, setiap sekolah yang menjadi mitra SPPG menunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) atau penanggung jawab yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan SPPG. PIC menjadi salah satu pihak yang membantu memperlancar pertukaran informasi antara kedua pihak. Informasi yang berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, jadwal distribusi, perubahan data, maupun kendala yang ditemukan selama pelaksanaan dapat disampaikan melalui koordinasi tersebut. Komunikasi yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat membantu membentuk

koordinasi yang lebih efektif sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kemitraan antara SPPG Sleman Kalasan Purwomartani 2 dengan sekolah-sekolah di wilayah pelayanannya berlangsung melalui beberapa tahapan. Kerja sama diawali dengan sosialisasi dan koordinasi sebelum program dilaksanakan. Pada tahap tersebut, SPPG menyampaikan informasi mengenai tujuan program MBG, mekanisme pelaksanaan, jadwal distribusi, serta data yang diperlukan. Selanjutnya, pihak sekolah memberikan data peserta didik yang menjadi penerima manfaat dan menunjuk PIC sebagai penghubung antara sekolah dengan SPPG selama program berlangsung.

Setelah program berjalan, koordinasi antara SPPG dan sekolah dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan beberapa media komunikasi, seperti grup *whatsApp*, telepon, kunjungan langsung, dan rapat koordinasi. Melalui berbagai saluran tersebut, SPPG dan sekolah dapat saling menyampaikan informasi mengenai jadwal distribusi, jumlah porsi makanan, perubahan data penerima manfaat, maupun kendala yang terjadi selama pelaksanaan program. Pihak sekolah juga dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pelayanan yang diterima sebagai bahan perbaikan bagi SPPG.

Dengan demikian, kemitraan antara SPPG dan sekolah tidak hanya berkaitan dengan proses pendistribusian makanan kepada peserta didik, tetapi juga mencakup proses komunikasi dan koordinasi yang berlangsung selama program dilaksanakan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program MBG dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara SPPG dengan sekolah menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Bentuk Komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dan Sekolah

Komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwomartani 2 dengan pihak sekolah merupakan bagian dari komunikasi organisasi yang berlangsung dalam proses pelaksanaan program MBG. Dalam penelitian ini, komunikasi organisasi antara SPPG dan sekolah terlihat melalui dua jalur, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan pada tahap awal pelaksanaan program MBG melalui penyampaian surat pemberitahuan dan kegiatan sosialisasi kepada pihak sekolah. Setelah program mulai dilaksanakan, komunikasi berkembang menjadi lebih fleksibel melalui *whatsApp*, telepon, dan komunikasi secara langsung ketika proses distribusi makanan berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara SPPG dan sekolah tidak hanya berlangsung pada tahap penyampaian informasi awal, tetapi terus berjalan selama program dilaksanakan.

Komunikasi formal melalui surat pemberitahuan dan sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan penyamaan pemahaman antara SPPG dan pihak sekolah mengenai pelaksanaan program MBG. Melalui komunikasi tersebut, pihak sekolah memperoleh informasi mengenai tujuan program, mekanisme pembagian makanan, jadwal distribusi, serta pembagian tugas masing-masing pihak. Sosialisasi yang dilakukan sebelum program dimulai juga memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk memahami prosedur pelaksanaan sehingga dapat mempersiapkan tenaga pendidik dan peserta didik sebelum program dijalankan.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Puasani (2019), yang menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berlangsung melalui jalur formal maupun informal untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi formal diwujudkan melalui surat pemberitahuan dan sosialisasi yang menjadi sarana penyampaian informasi awal mengenai pelaksanaan program MBG. Selain melalui jalur formal, komunikasi organisasi antara SPPG dan sekolah juga berlangsung melalui jalur informal. Seiring berjalannya program, penggunaan grup *whatsApp*, telepon, maupun komunikasi secara langsung menjadi sarana untuk menyampaikan informasi operasional yang membutuhkan respons lebih cepat. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan jadwal distribusi,

penyesuaian jumlah porsi makanan, maupun penyampaian kendala yang terjadi di lapangan. Penggunaan jalur informal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi formal dan informal memiliki fungsi yang saling melengkapi. Komunikasi formal memberikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan program, sedangkan komunikasi informal memberikan fleksibilitas dalam menindaklanjuti kebutuhan operasional yang muncul selama program berlangsung.

Komunikasi organisasi yang berlangsung antara SPPG dan sekolah juga menunjukkan adanya komunikasi dua arah. Pihak sekolah tidak hanya menerima informasi dari SPPG, tetapi juga memberikan informasi dan tanggapan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Pihak sekolah, misalnya, memberikan konfirmasi mengenai jumlah peserta didik, menyampaikan perubahan kegiatan sekolah, serta melaporkan kendala yang muncul selama pelaksanaan program MBG. Sebaliknya, SPPG memberikan tanggapan terhadap informasi maupun pertanyaan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, komunikasi yang berlangsung tidak hanya berupa penyampaian informasi dari SPPG kepada sekolah, tetapi juga melibatkan pertukaran informasi dan umpan balik dari kedua belah pihak. Komunikasi dua arah tersebut mendukung proses koordinasi antara SPPG dan sekolah dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi yang terdapat di lapangan.

Selanjutnya, proses komunikasi tersebut dapat dipahami menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell (Lawrence Neuman et al., 2011) yang terdiri atas lima unsur, yaitu komunikator (*who*), pesan (*says what*), media atau saluran (*in which channel*), komunikan (*to whom*), dan efek (*with what effect*). Dalam pelaksanaan Program MBG, SPPG berperan sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada pihak sekolah. Pesan yang disampaikan meliputi informasi mengenai jadwal distribusi makanan, jumlah porsi, prosedur pembagian makanan, serta perubahan dan kendala dalam pelaksanaan program. Media atau saluran yang digunakan meliputi surat pemberitahuan, sosialisasi, grup *whatsapp*, telepon, dan komunikasi secara langsung. Komunikan dalam penelitian ini adalah pihak sekolah yang menerima dan menindaklanjuti informasi dari SPPG. Sementara itu, efek komunikasi terlihat dari pemahaman pihak sekolah terhadap mekanisme pelaksanaan program, terbentuknya koordinasi antara SPPG dan sekolah, serta kemampuan kedua pihak dalam merespons dan menyelesaikan kendala yang muncul selama pelaksanaan Program MBG.

Temuan penelitian terdahulu memperkuat penelitian ini bahwa keberhasilan program MBG dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan (Nabila Putri Ananta et al., 2025; Rachman et al., 2026). Hasil penelitian ini juga menyampaikan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi Program MBG, terutama dalam mendukung koordinasi antar pihak selama pelaksanaan program di sekolah. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih khusus karena memusatkan perhatian pada komunikasi organisasi antara SPPG dan sekolah, terutama pada penggunaan komunikasi formal dan informal serta proses komunikasi dua arah yang berlangsung dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk komunikasi antara SPPG Purwomartani 2 dengan pihak sekolah dapat dipahami sebagai komunikasi organisasi yang berlangsung melalui jalur formal dan informal serta melibatkan komunikasi dua arah. Komunikasi formal dan informal tidak ditempatkan sebagai konsep yang terpisah, tetapi sebagai bentuk atau jalur komunikasi dalam hubungan organisasi antara SPPG dan sekolah. Sementara itu, model komunikasi Lasswell digunakan untuk melihat unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi tersebut, mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan, hingga efek komunikasi. Dengan demikian, komunikasi organisasi menjadi konsep yang menjelaskan hubungan komunikasi antara SPPG dan sekolah, sedangkan model Lasswell membantu menguraikan proses komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

Koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dan Sekolah

Komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwomartani 2 dengan pihak sekolah memiliki peran penting dalam membangun koordinasi selama pelaksanaan program MBG. Koordinasi tidak hanya dilakukan ketika program mulai dilaksanakan, tetapi terus berlangsung selama

proses distribusi makanan di sekolah. Komunikasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan SPPG dan pihak sekolah untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dan kebutuhan, sehingga pelaksanaan Program MBG dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Koordinasi antara SPPG dan sekolah salah satunya terlihat melalui pembagian tugas yang jelas. SPPG memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan makanan sesuai dengan standar gizi, melakukan pengemasan, serta mendistribusikan makanan ke sekolah sesuai jadwal. Di sisi lain, pihak sekolah bertugas menerima makanan, mengatur pembagian kepada peserta didik, melakukan pengawasan terhadap konsumsi makanan, serta menyampaikan informasi kepada SPPG apabila terdapat perubahan jumlah peserta didik atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan program. Pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan adanya pemahaman mengenai peran masing-masing pihak sehingga pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung secara lebih terarah.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat M. Sahdani Harahap et al., (2024) yang menjelaskan bahwa koordinasi merupakan proses yang mencakup pembagian kerja, kerja sama, komunikasi, dan perencanaan untuk menyatukan tindakan antarunit kerja agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara harmonis. Dalam penelitian ini, pembagian tugas antara SPPG dan pihak sekolah menjadi salah satu bentuk koordinasi yang mendukung kelancaran program MBG. Masing-masing pihak menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah dimilikinya, sementara komunikasi digunakan untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut tetap terhubung satu sama lain.

Selain pembagian tugas, koordinasi antara SPPG dan sekolah juga diwujudkan melalui pengaturan jadwal distribusi makanan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, SPPG menyampaikan jadwal pengiriman kepada pihak sekolah sehingga sekolah dapat menyesuaikan waktu pembagian makanan dengan kegiatan belajar mengajar. Ketika terdapat perubahan jadwal karena kondisi tertentu, informasi tersebut disampaikan kepada sekolah melalui media komunikasi yang telah digunakan oleh kedua pihak. Dengan demikian, pihak sekolah dapat melakukan penyesuaian tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran maupun proses pembagian makanan kepada peserta didik. Pengaturan jadwal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses koordinasi. Mekanisme koordinasi dalam organisasi mencakup pengaturan pembagian tugas serta komunikasi antarunit kerja untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam pelaksanaan pekerjaan (Prasetyo et al., 2026). Dalam pelaksanaan Program MBG, komunikasi yang dilakukan secara rutin membantu SPPG dan sekolah menyelaraskan jadwal kegiatan sehingga proses distribusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Koordinasi juga tampak dalam proses pelaporan kondisi pelaksanaan program dari pihak sekolah kepada SPPG. Selama Program MBG berlangsung, pihak sekolah menyampaikan informasi mengenai kondisi di lapangan, seperti jumlah peserta didik yang menerima makanan, peserta didik yang tidak hadir, serta kendala yang muncul ketika proses pembagian makanan berlangsung. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi SPPG untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan, sehingga pelaksanaan program pada hari berikutnya dapat berlangsung dengan lebih baik. Sebaliknya, SPPG juga menyampaikan informasi kepada sekolah apabila terdapat perubahan jumlah porsi, menu makanan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Proses pelaporan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara SPPG dan sekolah tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana pertukaran informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Melalui penyampaian informasi secara rutin, kedua pihak dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan segera melakukan penyesuaian apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian. Dengan demikian, pelaporan menjadi salah satu bagian yang mendukung kesinambungan koordinasi selama Program MBG berlangsung. Aspek koordinasi lainnya dapat dilihat melalui kegiatan pengawasan selama pelaksanaan Program MBG. Pihak sekolah melakukan pengawasan terhadap proses pembagian makanan kepada peserta didik, sedangkan SPPG memantau proses distribusi makanan sampai diterima oleh pihak sekolah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kendala, seperti keterlambatan distribusi atau perubahan jumlah peserta didik penerima manfaat, SPPG dan sekolah melakukan komunikasi untuk menentukan langkah penyelesaian yang diperlukan.

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam koordinasi yang berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan serta melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan (Pradhana et al., 2023). Dalam penelitian ini, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran distribusi makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga koordinasi antara SPPG dan sekolah. Ketika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan kondisi tersebut dan menentukan tindakan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antara SPPG dan sekolah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah. Komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan memudahkan kedua pihak dalam bertukar informasi, menyesuaikan kegiatan ketika terjadi perubahan, serta menyelesaikan kendala yang muncul selama program berlangsung. Komunikasi tersebut memungkinkan setiap pihak mengetahui kondisi pelaksanaan dan mengambil tindakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan demikian, komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus menjadi salah satu unsur yang mendukung terbentuknya koordinasi yang efektif antara SPPG dan sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program MBG. Penelitian ini memperlihatkan bahwa koordinasi tersebut tidak hanya terbentuk melalui pembagian tugas, tetapi juga melalui komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan selama program dilaksanakan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Nabila Putri Ananta et al., 2025) yang menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program MBG di sekolah. Pelaksanaan koordinasi antara SPPG Purwomartani 2 dan pihak sekolah dapat dilihat melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu pembagian tugas, pengaturan jadwal, pelaporan kondisi di lapangan, serta pengawasan selama proses distribusi dan pembagian makanan. Berbagai kegiatan tersebut didukung oleh komunikasi yang berlangsung secara rutin antara kedua pihak. Komunikasi memungkinkan informasi mengenai pelaksanaan program dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, komunikasi yang terjalin antara SPPG dan sekolah menjadi salah satu unsur yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan program MBG agar dapat berlangsung secara lebih teratur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program MBG. Komunikasi yang dilakukan oleh SPPG tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana koordinasi, membangun kerja sama, menyelesaikan permasalahan, serta menjaga hubungan antara SPPG dengan pihak sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara SPPG dan pihak sekolah berlangsung dalam bentuk komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan melalui surat pemberitahuan dan sosialisasi sebelum program dilaksanakan. Sementara itu, komunikasi informal berlangsung secara rutin melalui grup *whatsApp*, telepon, serta komunikasi secara langsung ketika proses distribusi makanan berlangsung. Komunikasi yang terjalin bersifat dua arah sehingga kedua pihak dapat saling bertukar informasi, memberikan masukan, dan melakukan koordinasi selama program berjalan. Komunikasi tersebut juga membantu pihak sekolah memahami mekanisme pelaksanaan MBG, pembagian tugas, jadwal distribusi, serta prosedur yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan program MBG, ditemukan beberapa hambatan komunikasi yang berkaitan dengan kondisi operasional di lapangan. Hambatan tersebut antara lain keterlambatan distribusi makanan, perubahan jumlah peserta didik penerima manfaat, serta penyesuaian jadwal dengan kegiatan sekolah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian informasi apabila tidak segera disampaikan kepada pihak terkait. Meskipun demikian, berbagai hambatan yang ditemukan tidak

sampai mengganggu keberlangsungan program karena adanya komunikasi yang terbuka dan responsif antara SPPG dengan pihak sekolah. Upaya yang dilakukan SPPG dalam menghadapi hambatan komunikasi dilakukan melalui penyampaian informasi secara cepat, terbuka, dan berkelanjutan. Grup *whatsApp* menjadi salah satu media komunikasi utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat sehingga kendala yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, komunikasi melalui telepon, koordinasi secara langsung, serta komunikasi tatap muka ketika proses distribusi berlangsung juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Berbagai upaya tersebut membantu membangun pemahaman bersama, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta menjaga kelancaran pelaksanaan program MBG di sekolah.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara SPPG dan pihak sekolah menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Komunikasi yang berlangsung melalui jalur formal maupun informal dapat membantu menciptakan koordinasi yang baik, memperjelas pembagian tanggung jawab, mempercepat penanganan berbagai kendala, serta mendukung tercapainya tujuan program MBG secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwomartani 2 yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Kepala SPPG Purwomartani 2, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sambisari, dan Kepala Sekolah TK Purbosari Kalasan yang telah bersedia menjadi informan penelitian serta memberikan informasi, pengalaman, dan keterbukaan data yang sangat membantu dalam proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriaji, M. (2026). Komunikasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 302–311. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5291>
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Arifin, S. R., Tanziha, I., Ekayanti, I., & Ahmad, A. (2025). The impact of a free nutritious meal program on elementary school students' concentration levels. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 10(3), 790. <https://doi.org/10.30867/action.v10i3.2737>
- Fitriani, Y., & Maulidya, A. (2026). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis: Studi pada Model Komunikasi dan Disposisi Birokrasi di Tingkat Daerah. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 6 (1), 1669–1682. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998).
- Lawrence Neuman, Peter M. Nardi, & Bruce L. Berg. (2011). *Research methods in communication* (Mahmod Eid, Ed.). Pearson Learning Solutions.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nabila Putri Ananta, D., Nadhira, S., & Bergizi Gratis, M. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi

Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SMA Swasta Lancang Kuning Kota Dumai). *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis JaPaBIS*, 7(2), 335–349. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/>

Prasetyo, D., Arianto, O. D., Firmannandya, A., & Putranto, T. D. (2026). School SPPG Coordination in Indonesia's Free Nutritious Meal Program (MBG): A Case Study in Bojonegoro, East Java. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 19–34. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2955>

Rachman, F., Akbar, M., & Farid, M. (2026). Analisis Komunikasi dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 10(04), 2118–7451. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Verdiana, L., & Muniroh, L. (2017). Kebiasaan Sarapan Berhubungan dengan Konsentrasi Belajar pada Siswa SDN Sukoharjo I Malang. *Media Gizi Indonesia*, 12 (1), 14–20. <https://doi.org/10.20473/mgi.v12i1.14-20>